

**MOTIVASI INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN MALAYSIA
DALAM BIDANG INFRASTRUKTUR (STUDI KASUS: MELAKA-
PEKANBARU POWER INTERCONNECTION 2002-2017)**

Oleh

Hamri Hompi

(hamrihompi27@gmail.com)

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Subranta Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to explain the motivation of Indonesia making a framework cooperation with Malaysia in the form of IMT-GT. In the year of 2002, Malaysia and Indonesia have agreed to build electric cable which spread out from Pekanbaru (Indonesia) to Melaka (Malaysia) . This Project is called “Melaka-Pekanbaru Power Interconnection”. Through this cooperation could fulfill the electrical energy needs in both countries, especially in Melaka and Pekanbaru.

This research is guided by qualitative explanation methods. All of data in this research are based on books, internet, media, journals, and other references. This research has been built by international cooperation theory by K.J. Holsti. This theory said that cooperation is made by merger of uniformity from national, regional, and global issues which need more attention from more than one state.

The result of this research shows that Indonesia making a framework cooperation with Malaysia in the form of Melaka-Pekanbaru Power Interconnection is to fulfill the electrical energy needs, especially in Pekanbaru. This cooperation which has been built since 2002 is planned to be done in the year of 2017.

Keywords: *Power interconnection, Indonesia Malaysia Thailand growth triangle, motivation*

Pendahuluan

Tulisan ini akan menjelaskan motivasi Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dalam proyek Melaka-Pekanbaru Power

Interconnection tahun 2002 pada kerangka kerja IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). IMT-GT didirikan tanggal 20 Juli 1993 pada pertemuan pertama Tingkat Menteri IMT-GT di Langkawi. IMT-GT menyediakan kerangka kerja sub regional untuk mempercepat kerjasama ekonomi

dan integrasi negara-negara anggota dan provinsi-provinsi ketiga negara tersebut.¹ KESR (Kerjasama Ekonomi Sub Regional) merupakan salah satu alat dan wadah yang potensial guna merubah lingkungan ekonomi regional dan global saat ini untuk merubah perspektif perkembangan daerah-daerah tertentu yang relatif tertinggal. Sementara perdagangan dalam wilayah regional suatu negara tetap sebagai suatu sasaran, dan memanfaatkan kedekatan geografisnya untuk memperluas perdagangan internasional dan dimulai dengan negara tetangga terdekat.²

Dasar hukum implementasi pengembangan KESR adalah Keppres 184 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional. Tim Koordinasi KESR beranggotakan: (1) Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sebagai Ketua; (2) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura; (3) Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT); (4) Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sebagai Anggota

merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina (BIMP-EAGA); (5) Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT); (6) Menteri Perhubungan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Wilayah Pertumbuhan Indonesia Australia; (7) Menteri Keuangan, sebagai Anggota; (8) Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota; (9) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota; (10) Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai Anggota.³ Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksana KESR di masing-masing wilayah pertumbuhan dan pengembangan.

Pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah nasional secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satu upaya tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan

¹IMT-GT. Diakses dari <<http://www.imtgt.org/About.htm>> pada tanggal 29 September 2015

² Andi Sahman. *Kerjasama Ekonomi Sub – Regional*. Diakses dari <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/Bulletin%2047.pdf> pada tanggal 06 Oktober 2015

³Bulletin kawasan. *Menangkap Peluang Perdagangan dan Investasi Melalui Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional*. Diakses dari <http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/BuletinKawasan/edisi_22_2008.pdf> Pada Tanggal 26 Juli 2016

ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan memberdayakan sumber daya manusia pada kawasan tersebut. Timbulnya KERS sangat erat kaitannya dengan berbagai kepentingan ekonomi dari masing-masing negara yang bersifat komplementaritas untuk mempercepat arus masuk investasi. Komplementaritas pada dasarnya adalah saling melengkapi apa yang kita miliki dan apa yang kita berikan kepada orang lain. Dalam kaitan ini pemerintah masing-masing negara berlaku sebagai fasilitator. Beberapa kerjasama internasional dan regional telah berkembang. Kerjasama sub regional tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu untuk mempercepat upaya pemerataan.

Kerjasama sub regional di Indonesia salah satunya diawali oleh bagian utara ASEAN, yakni kerjasama sub regional IMT-GT. Sejak tahun 1993 negara-negara anggota IMT-GT mulai melakukan pertemuan-pertemuan untuk perencanaan kerjasama IMT-GT kedepannya. IMT-GT menyediakan kerangka kerja untuk mempercepat kerjasama ekonomi dan integrasi negara-negara anggota dan provinsi ditiga Negara tersebut. Dengan pasar total 72 juta dan tanah seluas 602,293.9 kilometer persegi, potensi pertumbuhan dan pembangunan untuk regional ini sangat besar.⁴IMT-GT terbentuk karena adanya persamaan budaya, semangat serumpun dan struktur geografis

yang sangat mendukung adanya kerjasama tiga negara ini. Letak geografis wilayah sumatera yang merupakan wilayah anggota kerjasama segitiga pertumbuhan dengan semenanjung Malaysia dan Thailand sejak dulu telah terjalin interaksi budaya, dimana pulau Sumatera merupakan salah satu pulau dari enam buah pulau terbesar di Indonesia dengan luas 474.000 kilometer persegi merupakan pulau besar di bagian barat nusantara.⁵

Secara umum kerjasama IMT-GT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama antara Indonesia, Malaysia, Thailand dan diharapkan kerjasama pertumbuhan tersebut akan mempercepat arus perdagangan, investasi, pariwisata dan jasa serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Hal ini sesuai dengan konsep segitiga pertumbuhan sendiri yang merupakan kerjasama pertumbuhan tiga negara atau lebih yang memiliki kedekatan geografis yang terdapat perbedaan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal, manajemen dan sebagainya.⁶

Gambar 2.1. Wilayah Kerjasama

Indonesia-Malaysia-Thailand

⁵Ansori Siregar. 2009. *Peran IMT-GT Dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata Indonesia*. Skripsi FISIP Universitas Riau, hlm. 25

⁶Sukarna Wiranta, *Perdagangan Intra Regional dalam Pusat Pertumbuhan IMT-GT*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Volume XLIV No. 2 Tahun 1996, hal 105

⁴*Indonesia - Malaysia - Thailand Segitiga Pertumbuhan*. Diakses dari <<http://id.reingex.com/IMT-Growth-Triangle.shtml>> pada tanggal 19April 2016



Sumber : *Maps of IMT-GT*, dalam <http://www.imtgt.org/images/big-map.jpg> diakses pada 21 Mei 2016 Pukul. 14:07 Wib

Kerangka Teori

Untuk menjelaskan motivasi Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dalam proyek Melaka-Pekanbaru Power Interconnection tahun 2002 pada kerangka kerja IMT-GT, penulis menggunakan tingkat analisa perilaku kelompok. Tingkat analisa ini mempunyai asumsi bahwa individu secara umum melakukan tindakan internasional untuk membentuk kelompok kecil. Maksud asumsi ini bahwa interaksi yang terjadi di dunia internasional bukan ditentukan oleh individu melainkan kelompok kecil.

Tulisan ini menggunakan perspektif liberalisme. Liberalisme menghindari kondisi yang penuh

konflik antagonis terutama dengan melakukan kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama yang dimaksud bukanlah hanya melibatkan aktor non-negara meliputi organisasi internasional, perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional. Karena konflik memiliki potensi yang selalu besar, liberalis menggunakan pendekatan untuk mengurangi konflik dengan melibatkan kelompok selain negara.

Teori yang digunakan adalah teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti. Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keseragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari suatu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak. Kerjasama pada umumnya berlangsung pada situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara georrafis, sehingga untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Kerjasama diperlukan untuk pengembangan pembangunan sosial dalam suatu negara. Secara umum dalam eksistensinya di dunia internasional sebuah negara tidak

bisa berdiri sendiri dan cenderung membutuhkan bantuan negara lain. Fenomena yang akan diteliti yakni terjadinya kurang pasokan listrik di Indonesia, khususnya kota Pekanbaru. Dimana, sering mengalami pemadaman listrik. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi dengan warisan potensi minyak bumi. Namun Provinsi yang berada di tengah pulau Sumatera ini belum sepenuhnya mampu mengatasi defisit kebutuhan listriknya. Bahkan, kebutuhan listrik Provinsi Riau terus meningkat. Riau saat ini juga masih bermasalah persoalan defisit pasokan listrik.

Seperti yang diketahui, energy listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan usaha, baik di rumah, kantor, maupun tempat lainnya. Dalam waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi yang semakin meningkat atau munculnya berbagai industri-industri baru. Dengan adanya permasalahan seperti ini, sebuah Negara perlu melakukan kerjasama untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Gambaran Umum Wilayah kerjasama proyek Melaka-Pekanbaru *Power Interconnection*

• Melaka

Selat Malaka berada di antara dua daratan besar yaitu Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Saat ini ada tiga negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Panjang Selat Malaka adalah 600 mil dari Tanjung Jambuaye (Aceh) sampai ke Tanjung Pergam di Pulau Bintan atau dari Pulau Perak (Malaysia=M) sampai ke Taman Datok (M). Adapun lebarnya bervariasi mulai dari Utara, Selatan sampai ke Timur sebagai berikut:⁷

- Jarak Pulau Perak (M) dan Titik Berlian (Indonesia=I) 91 mil;
- Jarak Ujung Tamiang (I) dengan Pulau Penang (M) 126 mil;
- Jarak Pulau Berhala (I) dan Pulau Perak (M) 37,9 mil;
- Jarak Ujung Timbun Tulang (I) dan Tanjung Beras Babah (M) 71,8 mil;
- Jarak Pulau Rupat (I) dan Cape Bechabo (M) 20,9 mil;
- Jarak Pulau Bengkalis (I) dan Tanjung Jambo (M) 24,8 mil;

PEMBAHASAN

⁷ Syamsumar Dam. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 82

- Jarak Pulau Karimun Kecil Utara (I) dan Pulau Kukus (M) 8,4 mil;
- Jarak Pulau Karimun Kecil Selatan (I) dan Tanjung Piai (M) 9,26 mil;
- Jarak Pulau Nipah (I) dan Tanjung Gul (Singapura=S) 9,1 mil;
- Jarak Pulau Takong Besar (I) dan Pulau Senang (S) 3,2 mil;
- Jarak Pulau Sabar (I) dan Pulau Seburuk (S) 6,1 mil;
- Jarak Pulau Anak Sambu (I) dan P. St John (S) 3,8 mil;
- Jarak Sikwang (I) dan Tanjung Bedok (S) 8,7 mil;
- Jarak Tanjung Babi (I) dan Tanjung Siapa (M) 8,9 mil; dan
- Jarak Tanjung Pergam (I) dan Tanjung Datok 40

Batas-batas Selat Malaka yaitu di sebelah Barat dibatasi atau sejajar dengan bagian paling Utara Pulau Sumatera ($5^{\circ}40'LU$ $95^{\circ}26'BT$) dan Lem Voalan di bagian paling Selatan dari Goh Phuket (Pulau Phuket) di Thailand ($7^{\circ}45'LU$ $98^{\circ}18'BT$). Pada bagian Timur sejajar antara Tanjong Piai (Bulus), dan wilayah paling Selatan daripada Semenanjung Malaysia ($1^{\circ}16'LU$ $103^{\circ}31'BT$) dan kemudian ke arah Karimun ($1^{\circ}10'LU$ $103^{\circ}23.5'BT$). Di sisi Utara dibatasi oleh Pantai Barat Daya Semenanjung Malaysia dan dari Selatan dibatasi oleh pantai bagian Timur Laut Pulau Sumatera ke arah Timur dari Tanjung Kedabu ($1^{\circ}06'N$

$102^{\circ}58'BT$) kemudian ke Pulau Karimun.⁸

Pulau Sumatera (Indonesia) yang kawasannya langsung berhadapan dengan Selat Malaka adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, sedangkan negara bagian di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka adalah Kedah, Perlis, Malaka, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, dan Perak yang keseluruhan dari negara bagian ini terletak di Semenanjung Malaysia.⁹

Provinsi Riau adalah salah satu kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan sangat dekat dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Provinsi Riau menjadi pintu masuk ke wilayah Indonesia (Sumatera) yang sangat strategis Ada enam titik terluar dari Provinsi Riau yang dinilai berpotensi untuk menjadi gerbang keluar masuk dari dan ke Riau yaitu daerah Panipahan, dan Sinaboi (berada di Kabupaten Rokan Hilir), Tanjung Medang di Pulau Rupat (Kota Dumai), selat Baru (di Kabupaten Bengkalis), Selat Panjang dan Tanjung Samak di Kabupaten Meranti. Kabupaten atau kota di Provinsi Riau yang letaknya berbatasan dengan Selat Malaka adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti, dan Kota Dumai.¹⁰

• Pekanbaru

⁸Ibid., hal. 83-84

⁹ S. Pandoyo Toto. 1985. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara. Hal 3-4.

¹⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54000/3/Chapter%20II.pdf>

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang dan Rengat.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi Kecamatan. Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, dimekarkan dari 50 wilayah administrasi kelurahan menjadi 58 wilayah

administrasi kelurahan. Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 539 Rukun Warga (RW) dan 2.266 Rukun Tetangga (RT). Populasi penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2004 menurut Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru mencapai 711.130 jiwa, dengan demikian tingkat kepadatan penduduk Kota Pekanbaru lebih kurang 1.125 jiwa/km².

Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya, dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.¹¹

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi dengan warisan potensi minyak bumi. Namun Provinsi yang berada di tengah pulau Sumatera ini belum sepenuhnya mampu mengatasi defisit kebutuhan listriknya. Bahkan,

¹¹Pekanbaru Kota Bertuah. Situs resmi RRI Pekanbaru. Diakses dari <http://www.rripekanbaru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:pekanbaru-kota-bertuah&catid=41:rotator-news> pada 17 Juni 2016

kebutuhan listrik Provinsi Riau terus meningkat. Riau saat ini juga masih bermasalah persoalan defisit pasokan listrik.

Kebutuhan listrik Riau ketika beban puncak bisa mencapai 225,80 MW. Beban puncak yang besar belum didukung pasokan listrik memadai. Dalam masalah listrik, lima pembangkit yang memasok listrik ke wilayah Riau masih belum mampu memenuhi total kebutuhan listriknya. Lima pembangkit listrik itu hanya mampu memasok 190,8 mega watt (MW). Pembangkit itu terdiri Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang 114 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Teluk Lembu 43,3 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Lembu 7,5 MW, PLTD Dumai atau Bagan Besar 8 MW dan PLTG Riau Power 20 MW. Jadi Riau masih defisit sampai 135,47 MW.¹²

Dengan proyek pembangunan 10.000 MW tahap pertama, pasokan listrik Riau sedikit berkurang, Dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, Riau akan mendapat tambahan pasokan 2 x 100 MW. Namun untuk menekan persoalan kelistrikan, wilayah Riau baru menikmati enam tahun lagi, pasalnya proyeknya baru dimulai pada 2011 lalu. Dengan kondisi tersebut, penderitaan yang dirasakan masyarakat umum maupun industri akan minimnya pasokan listrik baru bisa diatasi mulai 2016. Untungnya para produsen CPO di Wilayah Riau telah memiliki pembangkit mandiri dan tidak sepenuhnya tergantung dari

listrik PLN.¹³ Untuk memenuhi kebutuhan listrik, produsen CPO telah memiliki pembangkit, bahkan dengan pembangkit yang dimiliki, mereka mampu memenuhi pasokan listrik mencapai 2.000 MW. Bisa dibayangkan, dengan kondisi listrik seperti sekarang ini, maka bisa PLN sediakan sebanyak itu.¹⁴

Dengan ketersediaan pasokan hanya 190,8 MW, sementara kebutuhan terus meningkat rata-rata sebesar 12 % per tahun, PLN pun harus mengatasi defisit kebutuhan listrik. Salah satu cara yang ditempuh adalah interkoneksi Sumatera dengan mengambil pasokan dari Sub Sistem Utara sebesar 32,2 MW. Sedangkan pasokan dari Sub Sistem Sumbagsel mencapai 112 MW. Dengan begitu, pasokan meningkat menjadi 144,2 MW. Jika diakumulasikan dengan pasok mampu Sub Sistem Riau, pasokan mencapai 234 MW. Cukup untuk menutup defisit listrik Riau yang mencapai 135,47 MW.¹⁵

Dengan kondisi listrikan yang mengawatirkan, pemerintah mendorong semua pembangkit listrik di Wilayah Riau dan sekitarnya menggunakan PLTU Cirenti yang berkapasitas 2 kali 100 MW. PLTU yang berada di mulut Tambang PT Tambang Batubara Bukit Asam tbk itu dapat dimaksimalkan penggunaannya. Terlebih lagi, ASEAN Connectivity telah merencanakan daerah Riau sebagai bagian untuk pengembangan elektrifitas di ASEAN. Namun persoalannya, tingkat elektrifikasi Riau sendiri masih rendah. Tentunya untuk mengatasinya persoalan

¹²Lebih besar pasak daripada tiang, dalam <http://www.pln.co.id/riau/?p=3343> diakses pada 18 Juni 2016 Pukul. 12:21 Wib

¹³*Ibid.*,

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*ibid*

tersebut.¹⁶ Di Riau pun untuk pasokan listrik tidak terlalu mencukupi.¹⁷

Riau mengalami krisis listrik bertahun-tahun karena beban (kebutuhan pelanggan) lebih besar dari pada kapasitas listrik yang diproduksi. Menurut PLN Wilayah Riau, beban puncak adalah 268,5 MW (menjelang September 2008). Sedangkan suplai listrik hanya 230 MW. Sehingga dalam keadaan normal, defisit listrik Riau Daratan mencapai 20 – 40 MW. Defisit sewaktu-waktu bisa meningkat karena kontribusi sistem jaringan Sumatera Bagian Selatan dan Tengah (SumBagSelTeng) pada sub sistem Riau cukup besar, yaitu 35 % (PLN Wil. Riau). Jika salah satu pembangkit pada sistem SumBagSelTeng mengalami gangguan, berdampak langsung ke Riau. Sebagai contoh, kerusakan PLTU Ombilin di Sumbar tahun 2004 memperparah krisis listrik yang saat itu berlangsung di Riau.¹⁸

Melaka – Pekanbaru Power Interconnection

Proyek Melaka-Pekanbaru Power Interconnection termasuk sebagai salah satu Proyek Konektivitas Prioritas (PCP) yang dikejar oleh IMT-GT dengan prioritas utama dalam daftar PCP untuk direalisasikan. Tahap 1 proyek ini direncanakan untuk diselesaikan oleh dua perusahaan nasional masing

masing dari negara Indonesia (PLN – Perusahaan Listrik Nasional) dan Malaysia (TNB- Tenaga Nasional Berhad) ditahun 2015. Proyek ini sudah lama direncanakan dibawah program kerjasama energy ASEAN dan merupakan bagian dari ASEAN Vision 2020 sehubungan dengan realisasi ASEAN Power Grid (APG) pada tahun 2018 interkoneksi ini bertujuan untuk memungkinkan kedua negara-negara untuk berbagi margin cadangan, termasuk pertukaran cadangan. Sistem ini memungkinkan perpindahan energy ekonomi dan pertukaran biaya pembangkitan dioptimalkan dengan mengelola beban puncak kedua daerah Sumatera dan Semenanjung Malaysia.¹⁹

Fase proyek ini ditujukan untuk transfer listrik dengan kapasitas 300 MW. Permintaan Semenanjung Malaysia adalah antara 09.00 ke 15.00 WIB dan permintaan puncak Sumatera adalah antara 18.00 – 22.00. Ketika satu sisi membutuhkan lebih banyak energi selama permintaan puncaknya yang sisi lain yang permintaan rendah selama periode karena itu dapat menyediakan pembangkit energi yang berlebih. Dan ini bekerja sebaliknya.²⁰

Asian Development Bank, membimbing dan mendukung IMT-GT ini dan proyek PCP lainnya, telah menyelesaikan ekonomi/bisnis model pembelajaran bagi PLN dan TNB pada Maret 2010. Dalam pertemuan pada bulan Februari 2011, presiden

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷*Op. Cit.*

¹⁸Kondisi Listrik Riau. Diakses dari <<http://www.alpensteel.com/article/126-113-energi-lain-lain/3637--kondisi-listrik-di-riau>> pada 18 Juni 2016

¹⁹*CIMT News Letter*,. Diakses dari <<http://www.imtgt.org/images/CIMT%20NEWSLETTER%20-%20December%202014.pdf>> pada 22 Mei 2016

²⁰*Ibid.*,

kedua perusahaan utilitas listrik nasional telah kembali menunjukkan kecerdasan mereka untuk bergerak maju dengan proyek. Penerbitan Indonesia dari Undang-undang baru untuk mendukung penjualan perbatasan beli listrik lintas pada April 2012, dan pemerintah negara bagian Melaka persetujuan atas akuisisi situs stasiun konverter dekat Telok Gong Melaka pada bulan Juni 2012.²¹

Tujuan proyek Melaka-Pekanbaru Interconnection untuk mendukung investasi dalam transmisi strategis yang menghubungkan daerah atau seluruh negara dengan mengoptimalkan jaringan listrik dengan mengurangi kebutuhan keseluruhan untuk kapasitas cadangan, meningkatkan keandalan sistem, menghapus kemacetan transmisi, dan transmisi listrik lebih murah dari satu daerah ke yang lain, menangani keseluruhan daerah sosio-ekonomi dan perbaikan lingkungan. Di dalam proyek, masing-masing negara akan bertukar kapasitas dan cadangan karena perbedaan jam sibuk dan kurva beban serta perbedaan waktu satu jam antara kedua negara.²²

Proyek ini akan melibatkan pembangunan 500 kV dengan tegangan arus searah (HVDC) daya transmisi antara Melaka dan Pekanbaru. Hal tersebut ditargetkan pembangunan transmisi hingga 600 MV kurang lebih 250 kV HVDC. Aktivitas proyek ini terdiri dari;²³

- Submarine Kabel (52 Km) melalui selat Malaka dari Telok Gong di Malaysia ke Pulau Rupat di Indonesia;
- Jalur transmisi Overhead (30 km) yang melintasi Pulau Rupat;
- Submarine kabel (5 km) melintasi Selat Rupat untuk ke Dumai di Sumatera
- 275 kV jalur transmisi overhead (200 km) dari Dumai ke Garuda Sakti di Sumatera Tengah (Riau Provinsi) yang akan dibangun oleh listrik negara Indonesia melalui Perusahaan - Perusahaan Listrik Negara (PLN)

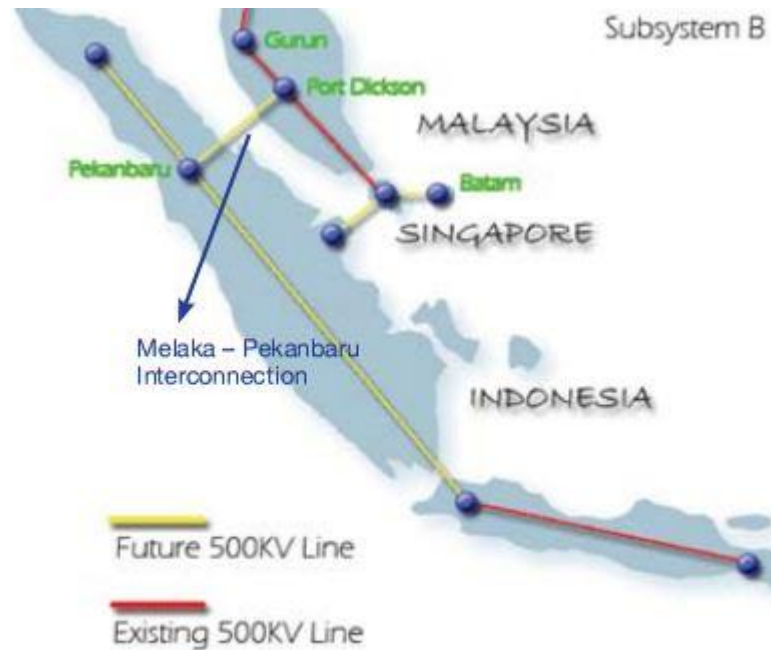
Proyek ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama fase terdiri dari pembentukan tiang tunggal 300 MW. Pembentukan kedua tiang 300 MW akan dilakukan pada tahap kedua, yang memungkinkan interkoneksi untuk operasi pada konfigurasi bipolar. PT PLN Persero Indonesia dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) dari Malaysia sepakat bahwa kelayakan Penelitian perlu dilakukan sebelum proyek bias dibiayai. Kedua pihak juga akan melakukan rinci studi rekayasa proyek ini.

²¹*Ibid.*,

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*,

Gambar 4.1. Rute Proyek Melaka-Pekanbaru Power Interconnection



Proyek ini diharapkan membawa manfaat bagi kedua masyarakat dan sektor swasta di negara-negara yang terlibat, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁴

- Manfaat strategis dari keamanan pasokan dan ditingkatkan kerjasama teknis dan komersial antara pihak;
- Manfaat pasokan peningkatan keandalan dan stabilitas memasok bersama-sama dengan tabungan cadangan berputar;
- Manfaat investasi dari irr tinggi (internal rate of kembali) proyek menghasilkan dalam kasus dasar dan tinggi sensitivitas terbalik secara tegas; dan

- Manfaat pembiayaan dari arus kas bebas yang sehat yang dapat membantu mendanai masa depan PLN dan TNB investasi.

²⁴*Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Syamsumar Dam. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara

S. Pandoyo Toto. 1985. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara

JURNAL

Sukarna Wiranta, *Perdagangan Intra Regional dalam Pusat Pertumbuhan IMT-GT*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLIV No. 2 Tahun 1996, hal 105

SKRIPSI

Ansori Siregar. 2009. *Peran IMT-GT Dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata Indonesia*. Skripsi FISIP Universitas Riau

INTERNET

IMT-GT. Diakses dari <http://www.imtgt.org/About.htm> pada tanggal 29 September 2015

Andi Sahman. *Kerjasama Ekonomi Sub – Regional*. Diakses dari ASEAN Declaration. Diakses dari <http://www.aseansec.org/1212.htm> pada tanggal 5 Juli 2016

Bulletin kawasan. *Menangkap Peluang Perdagangan dan*

Investasi Melalui Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional. Diakses dari http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/BuletinKawasan/edisi_22_2008.pdf Pada Tanggal 26 Juli 2016

Indonesia - Malaysia - Thailand Segitiga Pertumbuhan. Diakses dari <http://id.reingex.com/IMT-Growth-Triangle.shtml> pada tanggal 19 April 2016

BAB II PROFIL GEOPOLITIK SELAT MALAKA. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54000/3/Chapter%20II.pdf> pada 18 Juni 2016

Pekanbaru Kota Bertuah. Situs resmi RRI Pekanbaru. Diakses dari http://www.rripekanbaru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:pekanbaru-kota-bertuah&catid=41:rotator-news pada 17 Juni 2016

Lebih besar pasak daripada tiang. Diakses dari <http://www.pln.co.id/riau/?p=3343> pada 18 Juni 2016

Kondisi Listrik Riau. Diakses dari <http://www.alpensteel.com/article/126-113-energi-lain-lain/3637--kondisi-listrik-di-riau> pada 18 Juni 2016

CIMT News Letter,. Diakses dari <http://www.imtgt.org/image>

s/CIMT%20NEWSLETTER%
20-
%20December%202014.pdf
pada 22 Mei 2016